

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KOTA MALANG
(Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)**

Bonita Regina, Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: bonitaregina@gmail.com

Abstract: *The Implementation Of Policy School Operational Assistance In Malang (Study At Department Of Education Malang). Regional autonomy authorizes local governments to be responsible for each region. Government policies that are expected to improve the education that the School Operational Assistance policy. BOS management is the responsibility of each school run by the Head of School, School Treasurer, and the School Committee. This research is a descriptive qualitative study aimed to determine the BOS policy implementation in the city of Malang. The problem that occurs is the lack of BOS funds received by some schools, the school is less timely in reporting use of the funds, the lack of ability of teachers who became treasurer or BOS fund managers, as well as the lack of clear information received related public free schools. Therefore, the necessary training or upgrading capabilities for the officers involved on the BOS, transparency through the media available, more details of the information provided to the public through the medium of television, radio, or print media related to the notion of free schooling and explained with thorough and sustainable.*

Keywords: *policy, school, school operational assistance*

Abstrak: **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang).** Otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab atas setiap daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah yang dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada di kota Malang. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan atau *upgrading* kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS, adanya transparansi melalui media yang tersedia, lebih jelasnya informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui media televisi, radio, ataupun media cetak terkait anggapan sekolah gratis dan dijelaskan dengan menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci: bantuan operasional sekolah, kebijakan, sekolah

Pendahuluan

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa

setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun 12 wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat.

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus di perbaiki agar hak

setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah. Salah satu kota di Indonesia yang telah melaksanakan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah adalah Kota Malang. Kota Malang telah lama dikenal sebagai salah satu tujuan kota pendidikan. Melalui slogan *Tri Bina Cita*-nya pendidikan dijadikan sebagai salah satu tujuan rencana pembangunan kota.

Implementasi kebijakan Bantuan Operasional sekolah di kota Malang memiliki masalah, yaitu masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Permasalahan lain yang terjadi yaitu kurangnya koordinasi antara kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan dana BOS. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Bapak Sugiarto mengakui bahwa banyaknya sekolah yang bermasalah dalam pelaporan dana BOS semata karena tak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan, laporan penggunaan dana BOS harus menggunakan standar akuntansi keuangan yang benar. Dinas Pendidikan Kota Malang tak memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang masih bermasalah dalam soal pelaporan itu. (TEMPO, 2010). Adanya anggapan masyarakat tentang "Sekolah Gratis" menjadikan beban bagi pelaksana di sekolah untuk menjelaskan bahwa yang sebenarnya tidak semua itu gratis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di kota Malang, (2) Apa saja faktor yang menjadi pengaruh keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002, h.17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007 h.32-34) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan agenda
- b. Tahap formulasi kebijakan
- c. Tahap adopsi kebijakan
- d. Tahap implementasi kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan

Menurut Edward III (1975, dikutip dari widodo, 2012, h.96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

- a. Komunikasi

Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

- b. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan

- c. Disposisi

Disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

- d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefektifan struktur birokrasi.

2. Otonomi Daerah

Menurut Nurcholis (2007, h.30) Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus,

mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku

Menurut Ateng Safrudin dalam (Winarna, 2003) istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat).

Menurut Rozali Abdullah, (2007, h.5) prinsip otonomi daerah ada tiga, yaitu prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata, prinsip otonomi yang bertanggungjawab.

Menurut Mardiasmo (2002, h.46) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

3. Pendidikan

Menurut Redja Mudyahardjo (2001, h.59) mendefinisikan, "Pendidikan sebagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan/ atau latihan yang berlangsung seumur hidup untuk mempersiapkan peserta didik memainkan peranannya yang tepat dan konstruktif dalam berbagai lingkungan hidupnya dimasa yang akan datang".

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003, h.42), "Tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku yang lazimnya dirumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, ketrampilan yang diharapkan untuk dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan".

Menurut Wiji Suwarno (2006, h.76) enam pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO yang dapat digunakan sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan adalah *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu), *learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang), *learning to live together* (belajar untuk hidup bersama), *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar), dan *learning throughout life* (belajar dengan perubahan hidup).

Menurut H.M.Zainuddin (2008, h.127) menjelaskan, "Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari input atau sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan program pendidikan tingkat tertentu".

Menurut Harsono (2007, h.9) berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah

- b. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali murid
- c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali murid, misalnya sponsor dari lembaga keuangan atau sponsor
- d. Lembaga pendidikan itu sendiri.

4. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar. Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007, h.3) menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan mengenai implementasi kebijakan BOS dalam pengelolaan dana BOS di kota Malang..

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2012, h.34) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus dari penelitian ini adalah

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari
 - a. Prosedur dalam kebijakan bantuan operasional sekolah, adanya SOP (Standar Operasional dan Prosedur) dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah
 - b. Sasaran dari implementasi Bantuan Operasional Sekolah
 - c. Pelaksana atau implementator Bantuan Operasional Sekolah,
 - d. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan BOS
 - a. Komunikasi
Alur komunikasi yang ada dalam implementasi kebijakan dana BOS
 - b. Sumber Daya
 1. Staf, tenaga pengajar yang terdapat dalam implementasi BOS
 2. Informasi, sosialisasi yang dilakukan terkait informasi BOS
 3. Fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan melalui dana BOS
 4. Kewenangan, peran serta tanggung jawab yang diberikan kepada pelaksana implementasi BOS
 - c. Disposisi
Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan
 - d. Struktur Birokrasi
Terdapat dua aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu SOP, dan fragmentasi

Lokasi penelitian berada di Kota Malang, dan situs penelitiannya adalah di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Malang karena merupakan salah satu Dinas yang ada di Kota Malang yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu Kepala Bidang Sekolah Dasar,

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kota Malang, bendahara Sekolah Dasar Negeri Kesatrian 01, kepala Sekolah SD Negeri Model, serta orang tua siswa SD. Penelitian menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2008, h.243) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Tahap Implementasi merupakan sebuah proses yang paling menentukan apakah Bantuan Operasional Sekolah tepat sasaran atau tidak. Meskipun dana BOS yang diberikan telah ditetapkan jumlah dan mekanismenya, namun masih terjadi keterlambatan dana yang menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola kebutuhan sekolah. Kurangnya dana BOS yang diberikan juga menjadi alasan beberapa sekolah untuk meminta dana tambahan dari orang tua siswa.

a. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah

Sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 prosedur pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari lima (5) tahap, yaitu:

- 1) Proses Pendataan Pendidikan Dasar
- 2) Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
- 3) Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah
- 4) Penyaluran Dana BOS
- 5) Pengambilan Dana

b. Sasaran Bantuan Operasional Sekolah

Sasaran BOS di kota Malang adalah SD 269 sekolah, MI 49 sekolah, SMP 97 sekolah, MTs 26 sekolah, SMA 15 sekolah, dan SMK 51 sekolah. Seluruh sekolah di kota Malang menerima dana BOS, termasuk SD yang merupakan jenjang pendidikan awal/dasar dari program Dikdas yang diselenggarakan pemerintah. Salah satu sasaran yang menjadi objek penelitian dalam implementasi BOS di jenjang SD, yaitu SDN Model yang menerima dana BOS terbesar di kota Malang tahun 2013, dengan jumlah siswa 772 anak. dan SD Negeri Kesatrian 01 yang menerima dana BOS terbesar kedua di kota Malang tahun 2013, dengan jumlah siswa 744 anak

c. Pelaksana atau implementator Bantuan Operasional Sekolah

Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen Sekolah. Tim Manajemen Sekolah terdiri dari

Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara BOS sekolah, Komite Sekolah, dan Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan melihat dan mempertimbangkan kredibilitasnya, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

d. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Jumlah SD di Malang yang menerima Bantuan Operasional Sekolah yaitu 274 sekolah, yang terbagi SD Negeri 196 sekolah dan SD Swasta 77 sekolah, dan MI 49 sekolah. Penggunaan dana BOS yang dilakukan disekolah yang menjadi obyek penelitian yaitu SDN Model lebih banyak digunakan untuk penggajian guru honorer karena masih terdapat banyaknya guru disekolah tersebut yang belum PNS. Selain itu, dana BOS juga lebih banyak digunakan untuk perawatan sekolah dikarenakan luas tanah dan bangunan sekolah yang cukup luas.

Penggunaan dana BOS di SDN Kesatrian 01 lebih banyak digunakan untuk fasilitas sekolah yang ada dan kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak disekolah tersebut. Cukup banyaknya fasilitas disekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena tidak hanya pembelian fasilitas yang membutuhkan biaya tetapi perawatannya juga membutuhkan biaya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit salah satunya untuk membeli alat peraga ataupun penggajian pelatih untuk ekstrakurikuler tertentu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan BOS

a. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi antara dinas pendidikan kota Malang dengan sekolah sebagai obyek kebijakan berpotensi mengalami kegagalan, karena komunikasi yang bersifat satu arah, dimana pelaksana kebijakan menyampaikan dan menerapkan kebijakan yang dibuatnya tanpa adanya *feedback* dari sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan BOS. Hal ini terjadi dikarenakan pihak sekolah yang merasa khawatir dan takut untuk mengungkapkan aspirasinya kepada pelaksana kebijakan kemungkinan disebabkan sekolah sangat bergantung kepada pelaksana kebijakan. Tidak adanya *feedback* membuat pelaksana kebijakan kesulitan bahkan tidak tahu, kondisi riil dilapangan.

b. Sumber Daya

1) Staf

Permasalahan umum yang muncul terkait dengan keterbatasan jumlah staf dalam

program pemerintah adalah munculnya program atau tugas baru namun tidak diikuti dengan penambahan staf baru. Salah satu konsekuensi adanya keterbatasan staf adalah ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan secara langsung

2) Informasi

Pesan kepada sekolah yang menjadi objek penelitian pada dasarnya sudah disampaikan dengan jelas, pola penyampaian pesan yang dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung biasanya pada saat kegiatan sosialisasi atau workshop BOS yang diadakan di balai pertemuan atau kantor dinas. dari segi komunikasi hambatan yang terjadi adalah pesan yang disampaikan dalam iklan sekolah gratis, menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat walaupun iklan sekolah gratis sudah diklarifikasi tetapi tetap saja tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sekolah gratis masih rendah

3) Kewenangan

Kebijakan sekolah gratis memiliki struktur pelaksana bertingkat. Artinya terdapat beberapa jenjang instansi yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggung jawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horizontal. Berdasarkan kewenangan pengelolaan dana BOS dari Dinas Pendidikan kota Malang serta SDN Model dan SDN Kesatrian 01 adanya kesesuaian antara kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari pendelegasian wewenang tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan yang diberikan

4) Fasilitas

Perbedaan kondisi dan fasilitas yang ada di setiap sekolah membuat pelayanan dalam implementasi kebijakan BOS mengalami kesulitan untuk sekolah yang memiliki luas tanah dan gedung sekolah cukup besar. Maka dana BOS yang tidak cukup memadai untuk operasional sekolah yang digunakan untuk perawatan gedung yang besar dan fasilitas yang banyak. Secara umum penggunaan/ pemanfaatan dana BOS sudah sesuai dengan pemanfaatan dana BOS yang terdapat dalam Buku Panduan BOS, tetapi penggunaannya lebih banyak pada pembiayaan honor bulanan.

3. Kecenderungan/disposisi

Dalam organisasi sekolah, kepala sekolah menjadi pembuat sekaligus pelaksana kebijakan ditingkat sekolah. Kepala Sekolah harus

bertindak sebagai manajer atau pemimpin yang efektif. Sebagai manajer kepala sekolah harus mampu mengatur semua potensi agar sekolah dapat berfungsi secara optimal. Berkaitan dengan kesediaan kepala sekolah untuk menerima kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), secara umum kepala sekolah mau dan mampu menerapkan program BOS sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mencapai keberhasilan implementasi faktor sekolah, dukungan orang tua murid, komite sekolah dan masyarakat, harus mendapat perhatian dari pelaksana kebijakan. Pelaksanaan BOS di dua sekolah yang diteliti, secara umum sekolah mengajak komite dan orang tua siswa untuk mendukung keberhasilan program BOS.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan BOS di Kota Malang menambah tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan kota Malang. Hal yang perlu dilakukan Dinas Pendidikan dalam menyelesaikan program kebijakan pusat dan daerah menimbulkan masalah kurang atau bahkan tidak tepat waktu penyelesaian pelaksanaan BOS. SOP dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru yang memerlukan cara dan personal baru. Meskipun begitu, organisasi-organisasi yang memiliki prosedur perencanaan yang fleksibel

dan memiliki kewenangan yang cukup dalam melaksanakan program akan lebih gampang menyesuaikan dirinya terhadap tanggung jawabnya yang baru.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan dana BOS yang telah diatur setiap tahunnya melalui Petunjuk Teknis menjadi pedoman atau acuan bagi dinas pendidikan kota Malang sebagai tim manajemen BOS yang mengatur dana BOS di kota Malang. Kedisiplinan dari pihak sekolah serta penyalur dana BOS harus diperbaiki agar prosedur pelaksanaan dana BOS dapat berjalan sesuai dengan yang telah diatur dan tujuan untuk meningkatkan pendidikan dapat tercapai. nnya pelatihan atau *upgrading* kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS dan dilakukan rekrutmen baru tenaga administrasi BOS disekolah. Lebih jelasnya informasi yang diberikan pemerintah dan pihak sekolah atau masyarakat yang menjadi orang tua murid melalui penyuluhan atau pertemuan yang sifatnya berkala. Untuk masyarakat yang belum mengetahui dan menganggap adanya sekolah gratis dapat dipublikasikan dan dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko 2010. Pelaporan, Masalah Terbesar BOS di Kota Malang. **Tempo** [Internet], 21 Desember. Available from: <<http://www.tempo.co/read/news/2010/12/21/180300480/Pelaporan-Masalah-Terbesar-BOS-di-Kota-Malang>> [Accessed 29 November 2014].
- Harsono. 2007. **Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**. Yogyakarta, Pustaka Book Publisher.
- Joko Widodo. 2012. **Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik**. Malang, Bayu Media.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, Andhi.
- Moleong, Lexy. 2007. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mudyahardjo, R. 2001. **Pengantar Pendidikan**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo, S. 2003. **Pendidikan dan Perilaku Kesehatan**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. 2007. **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Jakarta, PT. Grasindo.
- Rozali, A. 2007. **Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sagala, S. 2006. **Konsep dan Makna Pembelajaran**. Bandung, CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung, Alfabeta.
- Suwarno, W. 2006. **Dasar-dasar Ilmu Pendidikan**. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Winarna, S.A. 2003. **Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi) 1**. Semarang, CV. Aneka Ilmu.
- Winarno, B. 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.
- Zainuddin, H. M. 2008. **Reformasi Pendidikan**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.